

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH OBYEK WISATA TAMAN REKREASI KALIBENING ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN PT TRISNA WAHIDA UTAMA**

Oleh :  
Yustina Puji Utami<sup>1</sup>, Ari Hernawan<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bangun guna serah obyek wisata taman rekreasi Kalibening antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan PT Trisna Wahida Utama serta menganalisis keseimbangan kedudukan hukum antara para pihak yang terikat dalam perjanjian bangun guna serah tersebut, yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang selaku unsur publik dan PT Trisna Wahida Utama selaku unsur privat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif empiris. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penelusuran berbagai dokumen beserta bahan-bahan pustaka untuk penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden untuk penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan kedudukan para pihak yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah tersebut tidak selalu seimbang serta terdapat dominasi Pemerintah Kabupaten Magelang selaku unsur publik. Ketidakseimbangan kedudukan tersebut terlihat dari pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian, PT Trisna Wahida Utama telah lalai dalam menjalankan beberapa kewajibannya sehingga mendapat teguran. Akhirnya, Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah tersebut diputus secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Magelang karena tidak ada tanggapan dan itikad baik dari PT Trisna Wahida Utama.

**Kata Kunci** : Bangun Guna Serah; Kedudukan Hukum; Perjanjian; Pelaksanaan Perjanjian; Wanprestasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**THE IMPLEMENTATION OF BUILD OPERATE TRANSFER  
AGREEMENT ON TOURISM SITE KALIBENING RECREATIONAL  
PARK BETWEEN GOVERNMENT OF MAGELANG REGENCY WITH  
TRISNA WAHIDA UTAMA LIMITED COMPANY**

By :  
Yustina Puji Utami<sup>3</sup>, Ari Hernawan<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

This research is purposed to understanding and analyzing the implementation of build operate transfer agreement on tourism site Kalibening recreational park between Government of Magelang Regency with Trisna Wahida Utama Limited Company. It is also analyzing the proportionality of legal position among parties in that build operation transfer agreement as an element of public and an element of private.

This research was a normative empirical research. Normative empirical law research basically use primary data that be obtained from field research and secondary data that be obtained from literature research. These data be gathered by looking for any documents and literature and also by doing direct interview with respondents. Based on these, the data's would be analyze by qualitative method. Then, the result of this research are presented by descriptive qualitative description.

Based on this research, there is a disproportion of legal position among parties in that build operate transfer agreement which is can be seen from the implementation and there is Government's domination as an element of public. On the implementation, Trisna Wahida Utama Limited Company has been doing breach of contract until getting legal notice from Government of Magelang Regency. Eventually, that build operate transfer agreement has been unilaterally terminated by Government of Magelang Regency because of there is no response and good intention from Trisna Wahida Utama Limited Company.

**Keywords** : Build Operate Transfer; Legal Position; Contract; Implementation of Contract; Breach of Contract

---

<sup>3</sup> Student of Undergraduate Program, Faculty of Law Gadjah Mada University.

<sup>4</sup> Faculty of Law Gadjah Mada University.